

---

## PERAN KERJA SAMA INTERNASIONAL DALAM MEMPERKUAT KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TERORISME

Umar Usman Aryadi <sup>a</sup>, Prihandono Wibowo <sup>b</sup>

<sup>a,b</sup>UPN Veteran Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

E-mail: aryadiarya02@gmail.com

---

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran kerja sama internasional dalam memperkuat kebijakan penanggulangan terorisme Indonesia ditengah meningkatnya kompleksitas ancaman terorisme transnasional. Permasalahan penelitian berangkat dari keterbatasan kapasitas kebijakan domestik dalam menghadapi jaringan terorisme global yang memanfaatkan konektivitas digital, mobilitas lintas negara, serta pendanaan internasional. Penelitian menggunakan metode *library research* dengan teknik analisis dokumen terhadap literatur akademik, laporan lembaga internasional, serta dokumen kebijakan pemerintah terkait kerja sama kontra-terorisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama internasional berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kapasitas institusional Indonesia melalui pertukaran intelijen, pelatihan aparat keamanan, harmonisasi kerangka hukum, serta penguatan koordinasi keamanan regional. Kerja sama bilateral dengan Australia dan Amerika Serikat mempercepat profesionalisasi aparat keamanan, sementara mekanisme multilateral melalui ASEAN memperkuat koordinasi kebijakan kawasan. Meskipun demikian, tantangan koordinasi antar aktor, kesenjangan kapasitas institusional, serta isu kedaulatan kebijakan masih memengaruhi efektivitas implementasi kerja sama internasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerja sama internasional merupakan instrumen strategis dalam memperkuat kebijakan penanggulangan terorisme Indonesia, namun efektivitasnya bergantung pada kemampuan negara mengintegrasikan hasil kerja sama ke dalam tata kelola keamanan nasional yang berkelanjutan. **Kata Kunci:** Penanggulangan terorisme, Kerja sama internasional, Terorisme transnasional, Keamanan nasional, Kebijakan publik.

### ABSTRACT

*This research aims to analyze the strategic role of international cooperation in bolstering Indonesia's counter-terrorism policies amidst the escalating complexity of transnational terrorist threats. The study is predicated on the limited capacity of domestic policies in confronting global terrorist networks that exploit digital connectivity, cross-border mobility, and international financing. Employing a library research method with document analysis techniques, this study examines academic literature, international institutional reports, and government policy documents pertaining to counter-terrorism cooperation. The findings demonstrate that international cooperation contributes significantly to enhancing Indonesia's institutional capacity through intelligence sharing, security personnel training, legal framework harmonization, and the strengthening of regional security coordination. Specifically, bilateral partnerships with Australia and the United States have accelerated the professionalization of security apparatuses, while multilateral mechanisms through ASEAN have fortified regional policy coordination. Nevertheless, challenges such as inter-actor coordination friction, institutional capacity gaps, and policy sovereignty concerns continue to influence the efficacy of international cooperation implementation. This research concludes that while international cooperation serves as a strategic instrument in strengthening Indonesia's counter-terrorism framework, its ultimate effectiveness depends on the state's ability to integrate cooperative outcomes into sustainable national security governance. **Keywords:** Counter-terrorism, International cooperation, Transnational terroris, National security, Public policy.*

---

\* Corresponding Author.

E-mail: aryadiarya02@gmail.com

## PENDAHULUAN

Terorisme merupakan ancaman keamanan non-tradisional yang kompleks bagi Indonesia, terutama karena karakter ancamannya yang semakin terhubung secara global. Sejak serangan Bom Bali tahun 2002, Indonesia mengalami berbagai peristiwa terorisme yang memengaruhi arah kebijakan keamanan nasional, termasuk serangan Bom Thamrin tahun 2016 dan Bom Surabaya tahun 2018 yang menunjukkan kemampuan adaptasi jaringan ekstremis dalam memanfaatkan ruang domestik dan global (Hoffman, 2017; Singh, 2020). Serangan tersebut memperlihatkan bahwa pola terorisme kontemporer tidak hanya melibatkan jaringan terorganisasi, tetapi juga aktor individu yang terpapar radikalisme digital. Perubahan pola ancaman ini mendorong pemerintah Indonesia untuk mengembangkan kebijakan penanggulangan terorisme yang semakin komprehensif melalui kombinasi pendekatan keamanan, pencegahan, serta deradikalisasi (BNPT, 2023). Transformasi kebijakan ini menunjukkan bahwa strategi kontra-terorisme nasional tidak dapat dilepaskan dari dinamika ancaman global yang semakin kompleks (Gunaratna & Ali, 2021).

Karakteristik terorisme kontemporer semakin menunjukkan dimensi transnasional yang kuat. Aktivitas jaringan teroris tidak lagi terbatas pada ruang domestik, melainkan melibatkan aliran pendanaan lintas negara, mobilitas pejuang asing, penyebaran ideologi melalui media digital, serta jaringan rekrutmen internasional (Gunaratna & Ali, 2021; Ramakrishna, 2018). Globalisasi teknologi informasi dan meningkatnya konektivitas antarnegara telah memberikan peluang bagi aktor non-negara untuk memperluas jangkauan operasionalnya melampaui batas yurisdiksi nasional. Kondisi ini menyebabkan kebijakan penanggulangan terorisme yang bersifat domestik semata menjadi semakin tidak memadai dalam menghadapi dinamika ancaman yang kompleks dan terhubung secara global (United Nations Security Council, 2021). Penanganan terorisme saat ini menuntut pendekatan yang lebih kolaboratif melalui kerja sama internasional yang mampu mengintegrasikan kapasitas keamanan lintas negara serta memperkuat koordinasi kebijakan keamanan global (Acharya, 2018).

Bagi Indonesia kerja sama internasional menjadi salah satu pilar penting dalam strategi nasional penanggulangan terorisme. Kemitraan bilateral dengan negara-negara seperti Australia, Amerika Serikat, dan sejumlah negara di kawasan Asia Pasifik telah berkontribusi terhadap penguatan kapasitas institusional aparat keamanan Indonesia, khususnya dalam bidang pertukaran intelijen, pelatihan kontra-terorisme, serta pengembangan kerangka hukum terkait pendanaan terorisme (Chalk, 2016; Gunaratna & Ali, 2021). Salah satu bentuk kerja sama yang paling menonjol adalah pendirian *Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation* (JCLEC) yang menjadi pusat pelatihan regional bagi aparat penegak hukum dalam menghadapi kejahatan terorganisasi dan terorisme. Selain itu, pada tingkat regional, Indonesia juga berperan aktif dalam mekanisme kerja sama keamanan ASEAN, termasuk melalui implementasi *ASEAN Convention on Counter Terrorism* (ACCT) yang bertujuan memperkuat koordinasi kebijakan serta harmonisasi kerangka hukum antarnegara anggota dalam menghadapi ancaman terorisme di kawasan (ASEAN, 2018; Singh, 2020).

Pada tingkat global, rezim kontra-terorisme yang berkembang melalui berbagai resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa serta mekanisme koordinasi internasional telah membentuk kerangka normatif bagi negara-negara dalam merumuskan kebijakan penanggulangan terorisme yang lebih terintegrasi (United Nations, 2020). Kerangka tersebut mendorong terbentuknya standar bersama terkait pertukaran informasi, koordinasi lintas negara, serta penguatan kapasitas institusional dalam menghadapi ancaman keamanan transnasional. Dalam konteks ini, kebijakan kontra-terorisme Indonesia tidak lagi berdiri secara terpisah, melainkan semakin terhubung dengan arsitektur keamanan regional dan global yang menekankan pentingnya kolaborasi internasional dalam merespons dinamika ancaman terorisme kontemporer (Ramakrishna, 2018).

Perkembangan literatur menunjukkan bahwa efektivitas kerja sama internasional dalam memperkuat kebijakan kontra-terorisme nasional masih menjadi perdebatan akademik. Sejumlah penelitian menekankan kontribusi kerja sama internasional terhadap peningkatan kapasitas operasional aparat keamanan, khususnya melalui mekanisme pertukaran intelijen, pelatihan teknis,

dan penguatan kemampuan investigasi (Jones, 2018). Temuan tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi antarnegara mampu meningkatkan efektivitas respons terhadap ancaman terorisme yang semakin kompleks. Namun demikian, beberapa studi masih berfokus pada capaian operasional jangka pendek, seperti keberhasilan penangkapan pelaku atau pembongkaran jaringan terorisme, tanpa mengeksplorasi secara lebih mendalam dampak jangka panjang kerja sama internasional terhadap pembangunan kapasitas institusional dan tata kelola kebijakan keamanan nasional (*Counter-Terrorism*, 2021; B. Singh, 2020).

Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) dalam memahami kerja sama internasional sebagai instrumen strategis yang berperan dalam membentuk arsitektur kebijakan kontra-terorisme nasional secara lebih sistematis. Sebagian besar kajian sebelumnya masih menempatkan kerja sama internasional sebagai faktor pendukung dalam penanggulangan terorisme, bukan sebagai elemen inti dalam proses penguatan kebijakan keamanan nasional. Padahal, dalam konteks ancaman terorisme yang semakin terhubung secara global, kerja sama internasional berpotensi berfungsi sebagai mekanisme transformasional yang memperkuat kapasitas institusional, mempercepat difusi pengetahuan kebijakan, serta meningkatkan koordinasi antaraktor keamanan di tingkat domestik maupun internasional (Acharya, 2018; Gunaratna & Ali, 2021). Relevansi penelitian ini semakin terlihat apabila mempertimbangkan perkembangan ancaman terorisme di Indonesia yang mengalami perubahan pola dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan intensitas serangan tidak serta-merta menunjukkan hilangnya ancaman, melainkan adanya pergeseran strategi jaringan ekstremis melalui radikalisme daring, perekrutan individu secara mandiri (*lone actor radicalization*), serta keterkaitan dengan jaringan global seperti *Islamic State* (Institute for Economics & Peace, 2023). Transformasi karakter ancaman tersebut menuntut kebijakan kontra-terorisme yang adaptif, terintegrasi, dan didukung oleh kerja sama internasional yang berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kerja sama internasional dalam memperkuat kebijakan kontra-terorisme Indonesia dalam menghadapi dinamika ancaman keamanan kontemporer. Fokus penelitian diarahkan pada tiga dimensi utama kerja sama internasional, yaitu kemitraan bilateral, keterlibatan multilateral melalui ASEAN dan rezim global, serta kontribusi program pembangunan kapasitas institusional terhadap penguatan kebijakan nasional. Penelitian ini menempatkan kerja sama internasional sebagai bagian integral dari arsitektur keamanan nasional Indonesia, bukan sekadar instrumen pelengkap dalam kebijakan kontra-terorisme. Kebaruan penelitian terletak pada upaya memetakan secara sistematis hubungan antara kerja sama internasional dan penguatan kebijakan kontra-terorisme Indonesia melalui tiga dimensi utama tersebut. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada aspek operasional penanggulangan terorisme, studi ini menekankan peran kerja sama internasional sebagai instrumen kebijakan strategis yang berkontribusi terhadap pembentukan kapasitas institusional dan koherensi kebijakan keamanan nasional dalam menghadapi ancaman terorisme yang semakin transnasional.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research* yang berfokus pada analisis dokumen untuk memahami peran kerja sama internasional dalam memperkuat kebijakan penanggulangan terorisme Indonesia (Yin, 2018). Data penelitian diperoleh dari sumber sekunder berupa artikel jurnal akademik bereputasi, laporan lembaga internasional, dokumen kebijakan pemerintah, serta publikasi organisasi regional seperti ASEAN dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengkaji secara sistematis perkembangan kebijakan kontra-terorisme Indonesia dalam konteks dinamika keamanan global (Creswell & Creswell, 2018). Fokus penelitian diarahkan pada identifikasi hubungan antara kerja sama internasional dan penguatan kapasitas institusional dalam kebijakan keamanan nasional. Penggunaan data sekunder memungkinkan analisis komprehensif terhadap perkembangan norma, institusi, serta praktik kerja sama kontra-terorisme. Metode ini dipilih

karena mampu menjelaskan fenomena kebijakan secara konseptual dan empiris berdasarkan literatur yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen yang meliputi identifikasi, klasifikasi, serta interpretasi sumber literatur terkait kerja sama bilateral, multilateral, dan penguatan kapasitas institusional dalam penanggulangan terorisme (Bowen, 2009). Data dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola hubungan antara kerja sama internasional dan penguatan kebijakan keamanan nasional Indonesia. Validitas penelitian diperkuat melalui triangulasi sumber dengan membandingkan temuan dari literatur akademik, laporan lembaga internasional, serta dokumen kebijakan pemerintah (Denzin, 2017). Analisis dilakukan secara sistematis untuk memastikan konsistensi antara kerangka teori dan temuan penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menjelaskan kontribusi kerja sama internasional dalam meningkatkan efektivitas kebijakan kontra-terorisme. Dengan demikian, metode *library research* memberikan dasar analitis yang kuat untuk memahami dinamika kebijakan keamanan nasional secara komprehensif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kerja Sama Kontraterorisme Bilateral dan Peningkatan Kapasitas Institusional

Kerja sama bilateral berperan sebagai salah satu instrumen strategis dalam upaya Indonesia memperkuat kapasitas institusi keamanan nasional dalam menghadapi ancaman terorisme yang semakin adaptif. Hubungan kemitraan dengan negara yang memiliki pengalaman panjang dalam penanggulangan ekstremisme memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan, teknologi investigasi, serta praktik kebijakan yang telah teruji dalam berbagai konteks keamanan (Singh, 2020). Dalam praktiknya, kolaborasi ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis aparat, tetapi juga pada pengembangan kerangka koordinasi yang mendukung efektivitas respons terhadap ancaman transnasional (Gunaratna & Ali, 2021). Keterlibatan aktor eksternal turut mempercepat difusi standar profesional dalam investigasi terorisme yang sebelumnya berkembang di negara-negara dengan kapasitas keamanan yang lebih mapan. Dampak kelembagaan terlihat pada meningkatnya kemampuan aparat dalam mengidentifikasi pola jaringan ekstremisme yang beroperasi secara lintas wilayah (Jones, 2018). Integrasi pengalaman internasional ke dalam sistem domestik memperlihatkan bahwa penguatan kapasitas tidak semata bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan penyesuaian tata kelola keamanan nasional terhadap dinamika ancaman global. Temuan ini menunjukkan bahwa kerja sama bilateral berkontribusi langsung terhadap penguatan struktur kebijakan kontra-terorisme Indonesia.

Relasi keamanan antara Indonesia dan Australia berkembang pesat setelah peristiwa bom Bali tahun 2002 yang mendorong peningkatan koordinasi penanganan terorisme secara lebih terstruktur. Intensitas interaksi antar aparat keamanan kedua negara mencerminkan kesamaan kepentingan dalam menjaga stabilitas kawasan dari ancaman ekstremisme kekerasan (Ramakrishna, 2018). Pembentukan *Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation* (JCLEC) pada tahun 2004 menjadi salah satu manifestasi institusional dari kemitraan tersebut, yang berfungsi sebagai pusat pelatihan regional dalam bidang kontra-terorisme dan kejahatan transnasional. Berbagai program yang diselenggarakan melalui lembaga ini memberikan akses terhadap metode investigasi berbasis *evidence*, teknik analisis forensik modern, serta pendekatan *inter-agency coordination* yang semakin berkembang dalam praktik keamanan global (Gunaratna & Ali, 2021). Penguatan kompetensi aparat melalui pelatihan berkelanjutan berkontribusi pada peningkatan kualitas respons terhadap ancaman keamanan yang semakin kompleks. Dampak kebijakan terlihat pada meningkatnya kemampuan deteksi dini terhadap aktivitas jaringan ekstremis yang memanfaatkan ruang digital sebagai sarana mobilisasi ideologi radikal (*Institute for Economics & Peace*, 2023). Keberadaan institusi pelatihan bersama menunjukkan bahwa kerja sama bilateral berfungsi sebagai sarana pembelajaran kebijakan yang berkelanjutan.

Kontribusi Amerika Serikat dalam penguatan kapasitas kontra-terorisme Indonesia juga terlihat melalui berbagai program pendidikan profesional di bidang penegakan hukum internasional. *International Law Enforcement Academy* menjadi salah satu forum yang

mempertemukan aparat keamanan dari berbagai negara untuk mempelajari teknik investigasi kriminal, analisis ancaman, serta strategi koordinasi lintas yurisdiksi (Jones, 2018). Keterlibatan aparat Indonesia dalam program tersebut memperluas perspektif kebijakan dalam memahami pola evolusi jaringan terorisme global yang semakin terdesentralisasi (Singh, 2020). Pertukaran pengalaman operasional memungkinkan proses adaptasi kebijakan berlangsung lebih cepat dibandingkan pengembangan kapasitas secara mandiri. Interaksi intensif antar aparat keamanan juga memperkuat jaringan profesional yang mendukung pertukaran informasi strategis dalam situasi krisis keamanan (Gunaratna & Ali, 2021). Akses terhadap praktik investigasi internasional memberikan referensi penting dalam memperbaiki standar operasional domestik. Penguatan kompetensi tersebut menunjukkan bahwa kerja sama bilateral tidak hanya menghasilkan manfaat teknis, tetapi juga membentuk orientasi kebijakan keamanan yang lebih adaptif terhadap perubahan pola ancaman.

Pendekatan institusionalisme liberal menjelaskan bahwa interaksi antarnegara memungkinkan terbentuknya mekanisme koordinasi yang mampu menurunkan ketidakpastian dalam sistem internasional (Keohane, 1984). Melalui pembentukan forum kerja sama yang relatif stabil, negara memperoleh ruang untuk bertukar informasi strategis serta mengembangkan prosedur respons yang lebih terstandarisasi (Krasner, 2016). Dalam konteks kontra-terorisme, keberadaan institusi kerja sama bilateral memfasilitasi proses *policy learning* yang mempercepat adopsi praktik terbaik dalam penanganan ancaman keamanan. Pengalaman negara mitra menjadi referensi penting untuk mengurangi biaya *trial and error* dalam perumusan strategi keamanan domestik. Interaksi yang berulang juga berkontribusi pada terbentuknya *trust building* yang mendukung efektivitas pertukaran informasi sensitif (Singh, 2020). Perspektif teoritis ini membantu menjelaskan bagaimana kerja sama internasional berperan dalam membentuk kapasitas institusional melalui difusi norma dan standar profesional global.

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa kerja sama keamanan internasional juga menghadirkan tantangan terkait potensi ketergantungan terhadap dukungan eksternal, terutama dalam program peningkatan kapasitas yang melibatkan transfer teknologi dan keahlian (Krasner, 2016). Ketergantungan yang tidak dikelola secara strategis berpotensi memengaruhi kemandirian negara dalam merumuskan prioritas kebijakan keamanan jangka panjang. Pertukaran intelijen lintas negara juga berkaitan dengan sensitivitas informasi strategis yang menuntut keseimbangan antara kebutuhan kolaborasi dan perlindungan kepentingan nasional (Singh, 2020). Literatur hubungan internasional menekankan pentingnya kemampuan negara dalam mempertahankan otonomi kebijakan meskipun terlibat dalam berbagai bentuk kerja sama keamanan global (Acharya, 2018). Penguatan kapasitas domestik menjadi prasyarat agar manfaat kerja sama dapat dioptimalkan tanpa mengurangi independensi pengambilan keputusan strategis. Posisi ini menunjukkan bahwa efektivitas kerja sama bilateral bergantung pada kemampuan integrasi hasil kolaborasi ke dalam sistem kelembagaan nasional. Stabilitas kebijakan keamanan nasional tetap ditentukan oleh kapasitas internal negara dalam mengelola dinamika kerja sama internasional.

Keberhasilan kerja sama bilateral tidak hanya tercermin dari intensitas program pelatihan atau frekuensi pertukaran informasi, tetapi dari sejauh mana hasil kolaborasi tersebut mampu memperkuat struktur kelembagaan keamanan nasional secara berkelanjutan. Adaptasi praktik terbaik internasional ke dalam sistem domestik memperlihatkan proses transformasi kebijakan yang berlangsung secara gradual (Gunaratna & Ali, 2021). Dampak jangka panjang terlihat pada meningkatnya kemampuan institusi keamanan dalam merespons perubahan pola ancaman yang semakin terhubung secara global (Institute for Economics & Peace, 2023). Penguatan tata kelola keamanan menunjukkan keterkaitan erat antara kerja sama internasional dan efektivitas strategi kontra-terorisme nasional. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa kerja sama bilateral berfungsi sebagai instrumen strategis dalam memperkuat kapasitas institusional, memperbaiki koordinasi antar lembaga, serta meningkatkan kualitas respons terhadap ancaman ekstremisme transnasional. Posisi tersebut menempatkan kerja sama internasional sebagai bagian integral dari arsitektur keamanan nasional Indonesia. Temuan ini sekaligus menjawab pertanyaan penelitian mengenai kontribusi kerja sama internasional terhadap penguatan kebijakan kontra-terorisme Indonesia.

## B. Tata Kelola Kontraterorisme Multilateral dalam Kerangka ASEAN

Selain melalui kemitraan bilateral, penguatan kebijakan kontra-terorisme Indonesia juga berlangsung melalui partisipasi aktif dalam berbagai mekanisme multilateral di kawasan Asia Tenggara. Keterlibatan dalam forum regional memberikan ruang koordinasi yang lebih luas untuk merespons ancaman terorisme yang semakin terhubung lintas negara. Dalam konteks ini, ASEAN berfungsi sebagai wadah normatif yang memungkinkan negara anggota menyelaraskan pendekatan kebijakan keamanan secara kolektif. Upaya kolaboratif tersebut mencakup pertukaran informasi strategis, pengembangan kapasitas kelembagaan, serta peningkatan koordinasi penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional (Acharya, 2018). Karakter ancaman ekstremisme yang adaptif mendorong negara-negara di kawasan untuk membangun kerangka kerja bersama yang mampu meningkatkan efektivitas respons keamanan regional (Ramakrishna, 2018). Melalui pendekatan multilateral, kebijakan nasional tidak lagi berdiri secara terpisah, tetapi terhubung dengan dinamika tata kelola keamanan kawasan yang lebih luas. Posisi ini menunjukkan bahwa kerja sama regional berperan penting dalam membentuk konsistensi strategi kontra-terorisme Indonesia.

Salah satu instrumen utama dalam kerja sama regional tersebut adalah *ASEAN Convention on Counter Terrorism* yang berfungsi sebagai kerangka hukum bersama dalam memperkuat koordinasi kebijakan penanggulangan terorisme di Asia Tenggara. Konvensi ini menyediakan dasar normatif bagi negara anggota untuk meningkatkan kolaborasi dalam pertukaran intelijen, bantuan hukum timbal balik, serta mekanisme ekstradisi pelaku terorisme lintas yurisdiksi (ASEAN Secretariat, 2021). Harmonisasi standar hukum melalui ACCT memperlihatkan adanya kesadaran kolektif bahwa ancaman terorisme tidak dapat ditangani secara unilateral oleh masing-masing negara. Melalui kerangka regulasi regional, negara anggota memiliki referensi prosedural dalam mengelola investigasi lintas batas serta memperkuat koordinasi aparat keamanan (Nesadurai, 2020). Kesamaan persepsi mengenai ancaman keamanan turut memperkuat legitimasi kebijakan nasional dalam konteks kerja sama kawasan. Proses institusionalisasi norma ini menunjukkan bahwa kerja sama regional berfungsi sebagai mekanisme penyalarsan kebijakan yang mengurangi kesenjangan pendekatan antarnegara. Keberadaan ACCT memperlihatkan bagaimana norma internasional diinternalisasi ke dalam kebijakan domestik.

Walaupun demikian, efektivitas mekanisme ASEAN tidak dapat dilepaskan dari karakter kelembagaan organisasi yang menekankan prinsip kedaulatan dan *non-interference* sebagai dasar interaksi antarnegara anggota. Prinsip tersebut membatasi kemungkinan integrasi keamanan yang terlalu dalam karena setiap negara tetap mempertahankan kontrol atas kebijakan domestiknya (Acharya, 2018). Koordinasi regional yang terbentuk cenderung bersifat konsultatif dibandingkan supranasional, sehingga implementasi kebijakan tetap bergantung pada kesiapan masing-masing negara. Dalam konteks ini, instrumen seperti ACCT berfungsi sebagai pedoman normatif yang mendorong konvergensi kebijakan tanpa mengurangi otonomi nasional (Nesadurai, 2020). Pendekatan berbasis konsensus memperlihatkan karakter khas ASEAN dalam mengelola isu keamanan yang sensitif secara politik. Harmonisasi kebijakan berlangsung secara gradual melalui dialog dan pertukaran praktik terbaik antarnegara anggota. Dinamika ini menunjukkan bahwa kerja sama regional tetap memberikan kontribusi meskipun tidak menghasilkan integrasi keamanan yang sepenuhnya terpadu.

Partisipasi Indonesia dalam berbagai forum keamanan kawasan memperkuat keselarasan antara kebijakan domestik dan agenda keamanan regional yang lebih luas. Keterlibatan aktif dalam *ASEAN Regional Forum* serta *ASEAN Defence Ministers' Meeting-Plus* memberikan ruang dialog strategis terkait berbagai isu keamanan, termasuk terorisme lintas negara. Forum-forum tersebut memungkinkan pertukaran pandangan mengenai pengawasan perbatasan, keamanan maritim, serta mekanisme pencegahan radikalisme berbasis komunitas (Ramakrishna, 2018). Diskursus kebijakan yang berlangsung secara berkelanjutan membantu negara anggota memahami pola evolusi ancaman keamanan yang semakin kompleks. Bagi Indonesia, keterlibatan ini memberikan kesempatan untuk memperkuat koordinasi regional sekaligus menyesuaikan strategi domestik dengan dinamika kawasan (Singh, 2020). Interaksi antarnegara juga memperkuat kepercayaan

strategis yang menjadi prasyarat penting dalam pertukaran informasi sensitif. Konsistensi partisipasi menunjukkan komitmen Indonesia dalam memperkuat stabilitas keamanan kawasan.

Dalam praktik implementasi, forum multilateral tidak hanya berfungsi sebagai ruang dialog normatif, tetapi juga sebagai sarana penguatan kapasitas institusional melalui berbagai program teknis. Kegiatan seperti pelatihan bersama, workshop keamanan regional, serta simulasi penanganan krisis memberikan kesempatan bagi aparat keamanan untuk mengembangkan keterampilan operasional yang relevan dengan dinamika ancaman kontemporer (Institute for Economics & Peace, 2023). Transfer pengalaman antarnegara memperkaya perspektif kebijakan dalam memahami pola rekrutmen dan mobilisasi jaringan ekstremisme. Bagi Indonesia, partisipasi dalam kegiatan tersebut membantu mengintegrasikan praktik terbaik internasional ke dalam kerangka kebijakan nasional. Penguatan kapasitas aparat menunjukkan bahwa kerja sama multilateral berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesiapan institusi keamanan domestik. Proses pembelajaran kebijakan berlangsung secara simultan melalui interaksi intensif antarnegara anggota. Hasilnya terlihat pada meningkatnya adaptasi strategi nasional terhadap perubahan pola ancaman global.

Selain memperkuat koordinasi internal kawasan, mekanisme ASEAN juga berfungsi sebagai penghubung kerja sama dengan berbagai mitra eksternal. Melalui format seperti ADMM-Plus dan ARF, negara anggota berinteraksi dengan aktor global termasuk Jepang, Amerika Serikat, serta Uni Eropa dalam berbagai agenda keamanan strategis (Nesadurai, 2020). Kolaborasi tersebut membuka peluang transfer teknologi keamanan, pengembangan sistem pengawasan, serta peningkatan kapasitas analisis intelijen. Interaksi lintas kawasan memperluas cakupan kerja sama sekaligus memperkaya referensi kebijakan dalam menghadapi ancaman keamanan non-tradisional. ASEAN berperan sebagai platform diplomasi keamanan yang menghubungkan kepentingan regional dengan tata kelola keamanan global. Sinergi antara aktor regional dan internasional memperkuat legitimasi kebijakan kontra-terorisme yang diadopsi negara anggota. Peran penghubung ini memperlihatkan posisi strategis ASEAN dalam arsitektur keamanan global (Nye, 2017).

Walaupun berbagai peluang kerja sama tersedia, implementasi kebijakan multilateral masih menghadapi tantangan struktural yang berkaitan dengan perbedaan kapasitas antarnegara anggota. Tingkat kesiapan institusi keamanan di kawasan tidak seragam, terutama dalam aspek sumber daya manusia, teknologi pengawasan, maupun koordinasi antar lembaga domestik (Institute for Economics & Peace, 2023). Variasi kapasitas tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan regional pada tingkat nasional. Sebagian negara memiliki kerangka regulasi yang lebih matang, sementara negara lain masih menghadapi keterbatasan infrastruktur keamanan. Kondisi ini menciptakan kesenjangan implementasi yang memerlukan pendekatan adaptif dalam pelaksanaan kerja sama regional (Acharya, 2018). Tantangan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kerja sama tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan formal, tetapi juga kesiapan institusional domestik. Penguatan kapasitas internal tetap menjadi faktor penentu keberhasilan kebijakan kontra-terorisme kawasan.

Perbedaan prioritas politik antarnegara anggota juga berpengaruh terhadap konsistensi implementasi komitmen regional yang telah disepakati. Meskipun kerangka kerja formal telah tersedia, proses implementasi sangat dipengaruhi oleh dinamika kepentingan nasional masing-masing negara (Nesadurai, 2020). Dalam beberapa situasi, koordinasi domestik yang terbatas dapat memperlambat adopsi kebijakan yang telah dirumuskan pada tingkat regional. Literatur hubungan internasional menunjukkan bahwa keberhasilan kerja sama multilateral sangat bergantung pada kemampuan negara anggota dalam mengintegrasikan komitmen eksternal ke dalam kebijakan nasional (Acharya, 2018). Kondisi ini menegaskan pentingnya konsistensi kebijakan domestik sebagai prasyarat efektivitas kerja sama regional. Bagi Indonesia, keterlibatan dalam mekanisme ASEAN menunjukkan upaya menempatkan kebijakan kontra-terorisme dalam kerangka tata kelola keamanan kawasan yang lebih luas. Pendekatan ini memperkuat legitimasi kebijakan nasional sekaligus meningkatkan koordinasi regional dalam menghadapi ancaman terorisme yang semakin kompleks.

### C. Kerja Sama Institusional dan Profesionalisasi dalam Tata Kelola Kontraterorisme Indonesia

Kerja sama institusional menjadi mekanisme penting yang memungkinkan keterlibatan internasional diterjemahkan ke dalam kapasitas operasional dalam arsitektur kontra-terorisme Indonesia. Dalam konteks ini, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berperan sebagai aktor kunci yang mengoordinasikan kebijakan nasional sekaligus memfasilitasi kolaborasi dengan berbagai mitra global. Sebagai lembaga yang memiliki mandat koordinatif lintas sektor, BNPT berfungsi sebagai penghubung antara kepolisian, komunitas intelijen, kementerian teknis, serta organisasi internasional yang terlibat dalam program penguatan kapasitas keamanan (Singh, 2020). Kompleksitas ancaman terorisme yang semakin terhubung secara global meningkatkan kebutuhan terhadap integrasi kebijakan yang mampu menjembatani kepentingan domestik dan internasional. Melalui partisipasi dalam forum strategis, pelatihan profesional, serta pertukaran pengalaman kebijakan, BNPT memperluas akses terhadap praktik terbaik dalam penanggulangan ekstremisme (Gunaratna & Ali, 2021). Transfer pengetahuan tersebut mencakup pengembangan metode deteksi dini, strategi pencegahan radikalisisasi, serta penguatan koordinasi antar lembaga keamanan. Peran institusional ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan kontra-terorisme bergantung pada kemampuan organisasi domestik dalam mengadaptasi dinamika keamanan global.

Selain melalui forum kebijakan internasional, kerja sama institusional juga diperkuat melalui keterlibatan Indonesia dalam jaringan kepolisian global yang memfasilitasi pertukaran informasi lintas negara. Dalam hal ini, INTERPOL serta ASEANAPOL memainkan peran penting dalam menyediakan akses terhadap basis data kriminal internasional serta sistem notifikasi keamanan transnasional. Infrastruktur informasi tersebut memungkinkan aparat penegak hukum Indonesia memperoleh referensi investigasi yang relevan dengan aktivitas jaringan terorisme lintas batas (Ramakrishna, 2018). Partisipasi dalam operasi terkoordinasi juga meningkatkan kemampuan respons operasional terhadap potensi ancaman keamanan yang memerlukan kerja sama cepat antarnegara. Pertukaran data secara *real-time* membantu memperkuat efektivitas deteksi pola mobilisasi individu yang terindikasi terlibat dalam aktivitas ekstremisme (Institute for Economics & Peace, 2023). Integrasi jaringan informasi global menunjukkan bahwa kerja sama institusional berfungsi sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kesiapan operasional aparat keamanan domestik. Ketersediaan akses terhadap sistem informasi internasional memperlihatkan pentingnya konektivitas dalam tata kelola keamanan modern.

Pendekatan kelembagaan dalam penanggulangan terorisme juga mengalami perkembangan seiring meningkatnya perhatian terhadap strategi pencegahan ekstremisme kekerasan. Melalui berbagai program yang difasilitasi oleh United Nations Office of Counter-Terrorism, Indonesia terlibat dalam inisiatif global yang menekankan pentingnya integrasi pendekatan keamanan dengan dimensi sosial dan kemasyarakatan (UNOCT, 2022). Konsep *countering violent extremism* (CVE) menempatkan faktor ketahanan masyarakat sebagai elemen penting dalam mencegah penyebaran ideologi radikal (Schmid, 2020). Strategi ini menekankan pentingnya pendidikan, pemberdayaan komunitas, serta penguatan inklusi sosial sebagai bagian dari kebijakan keamanan nasional. Bagi Indonesia, pendekatan tersebut relevan dengan karakter masyarakat yang pluralistik dan memiliki keragaman sosial budaya yang tinggi. Upaya pencegahan berbasis komunitas membantu mengurangi potensi rekrutmen jaringan ekstremisme yang memanfaatkan kerentanan sosial (Gunaratna & Ali, 2021). Pergeseran paradigma ini menunjukkan bahwa kebijakan kontra-terorisme tidak lagi terbatas pada pendekatan koersif, tetapi juga mencakup strategi preventif yang lebih luas.

Penguatan kapasitas institusional turut didukung oleh berbagai platform pelatihan profesional yang berfokus pada peningkatan kompetensi teknis aparat penegak hukum. Salah satu institusi yang berperan dalam proses tersebut adalah *Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation* yang menyediakan berbagai program pelatihan dalam bidang koordinasi intelijen, investigasi kejahatan finansial, serta penguatan keamanan perbatasan (Ramakrishna, 2018). Program pelatihan yang diselenggarakan tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis aparat, tetapi juga

memperkuat jaringan profesional antar lembaga keamanan di kawasan. Interaksi intensif dalam forum pelatihan membantu membangun kepercayaan strategis yang penting dalam mendukung pertukaran informasi sensitif. Peningkatan kapasitas berbasis pelatihan menunjukkan bahwa kerja sama internasional berkontribusi langsung terhadap profesionalisasi aparat keamanan domestik (Institute for Economics & Peace, 2023). Transfer pengalaman operasional memungkinkan adaptasi kebijakan berlangsung lebih efisien dibandingkan pengembangan kapasitas secara mandiri. Platform pelatihan ini memperlihatkan bagaimana kerja sama institusional berfungsi sebagai mekanisme difusi praktik terbaik dalam tata kelola keamanan global.

Interaksi profesional dalam berbagai kegiatan internasional juga memperkuat jejaring kerja antar lembaga yang terlibat dalam penanggulangan kejahatan transnasional. Hubungan kerja yang terbangun melalui *workshop* keamanan, pelatihan teknis, maupun forum kebijakan mempercepat proses koordinasi operasional lintas negara (Singh, 2020). Dalam perspektif kelembagaan, jejaring profesional tersebut berfungsi sebagai medium difusi norma, standar operasional, serta metodologi investigasi yang berkembang dalam praktik keamanan global. Partisipasi berkelanjutan dalam berbagai program internasional memberikan akses terhadap referensi kebijakan yang dapat diadaptasi sesuai kebutuhan domestik. Proses pembelajaran institusional berlangsung secara gradual melalui interaksi berulang antar aktor keamanan. Dampaknya terlihat pada meningkatnya profesionalisme aparat serta penguatan tata kelola kebijakan kontra-terorisme nasional. Penguatan jejaring kerja menunjukkan bahwa kerja sama internasional berperan penting dalam meningkatkan efektivitas koordinasi kebijakan keamanan.

Walaupun kerja sama institusional memberikan berbagai manfaat strategis, implementasinya tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Perbedaan kapasitas sumber daya antar lembaga keamanan domestik masih menjadi tantangan dalam mengoptimalkan integrasi kebijakan kontra-terorisme (Institute for Economics & Peace, 2023). Sebagian institusi memiliki dukungan teknologi dan sumber daya manusia yang lebih memadai, sementara lembaga lain masih menghadapi keterbatasan dalam integrasi sistem informasi maupun koordinasi operasional. Fragmentasi administratif berpotensi menghambat sinkronisasi kebijakan keamanan yang memerlukan respons cepat dan terkoordinasi. Kendala koordinasi antar lembaga menunjukkan bahwa efektivitas kerja sama internasional tetap bergantung pada kesiapan struktur kelembagaan domestik (Singh, 2020). Penguatan sistem integrasi data serta peningkatan interoperabilitas antar institusi menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan keamanan nasional. Kondisi ini menegaskan bahwa reformasi kelembagaan domestik merupakan prasyarat penting bagi optimalisasi manfaat kerja sama internasional.

Penguatan kebijakan kontra-terorisme Indonesia tidak hanya ditentukan oleh intensitas kerja sama global, tetapi juga oleh kemampuan negara dalam mengintegrasikan berbagai sumber daya yang diperoleh melalui kolaborasi internasional ke dalam sistem kebijakan yang koheren. Peningkatan koordinasi antar lembaga, penguatan sistem berbagi informasi, serta pengembangan perencanaan strategis jangka panjang menjadi elemen penting dalam memastikan keberlanjutan kebijakan keamanan nasional (Schmid, 2020). Integrasi kebijakan menunjukkan bahwa kerja sama institusional berfungsi sebagai katalis dalam memperkuat kapasitas negara menghadapi ancaman ekstremisme yang semakin kompleks. Optimalisasi manfaat kerja sama internasional bergantung pada kemampuan adaptasi institusi domestik terhadap perubahan dinamika keamanan global. Posisi ini menegaskan pentingnya sinergi antara kebijakan nasional dan praktik internasional dalam membangun sistem kontra-terorisme yang efektif. Hasil analisis memperlihatkan bahwa kerja sama institusional berkontribusi signifikan terhadap penguatan kapasitas operasional kebijakan kontra-terorisme Indonesia.

#### **D. Tantangan Kebijakan dan Arah Ke Depan**

Kerja sama internasional telah memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan kebijakan kontra-terorisme Indonesia, sejumlah kendala struktural masih memengaruhi efektivitas implementasinya. Kompleksitas koordinasi antar mitra global menjadi salah satu tantangan utama karena setiap negara memiliki persepsi ancaman, orientasi kebijakan, serta prioritas keamanan yang tidak selalu selaras (Singh, 2020). Variasi pendekatan tersebut berpotensi menimbulkan friksi

dalam pertukaran informasi intelijen maupun sinkronisasi strategi penegakan hukum lintas yurisdiksi. Dalam konteks ancaman terorisme yang bersifat transnasional, ketidaksamaan kerangka regulasi dapat menciptakan celah koordinasi yang berisiko dimanfaatkan oleh jaringan ekstremisme global (Gunaratna & Ali, 2021). Perbedaan standar operasional juga memengaruhi kecepatan respons terhadap potensi ancaman yang memerlukan tindakan kolektif. Tantangan koordinasi ini menunjukkan bahwa efektivitas kerja sama internasional sangat dipengaruhi oleh tingkat konvergensi kepentingan strategis antarnegara. Harmonisasi kebijakan menjadi prasyarat penting dalam memperkuat tata kelola keamanan global yang responsif terhadap dinamika ancaman kontemporer.

Kendala koordinasi juga terlihat dalam kerangka kerja keamanan kawasan Asia Tenggara yang melibatkan ASEAN sebagai platform regional utama. Walaupun berbagai instrumen kebijakan telah dikembangkan, implementasi kerja sama kontra-terorisme masih dipengaruhi oleh variasi kapasitas institusional antarnegara anggota (Acharya, 2018). Ketimpangan dalam kemampuan penegakan hukum, infrastruktur intelijen, serta ketersediaan sumber daya keamanan menciptakan tingkat kesiapan yang tidak seragam dalam menghadapi ancaman ekstremisme (Institute for Economics & Peace, 2023). Perbedaan kapasitas tersebut membatasi kedalaman integrasi operasional yang dapat dicapai dalam mekanisme keamanan regional. Dalam praktiknya, koordinasi kebijakan sering kali bergantung pada kesiapan domestik masing-masing negara dalam mengimplementasikan komitmen regional. Kondisi ini memperlihatkan bahwa efektivitas kerja sama multilateral tidak hanya ditentukan oleh keberadaan institusi regional, tetapi juga oleh kesiapan struktural negara anggota. Kesenjangan kapasitas menjadi faktor yang memengaruhi konsistensi respons kawasan terhadap ancaman keamanan transnasional.

Selain aspek koordinasi eksternal, integrasi hasil kerja sama internasional ke dalam kebijakan domestik juga menjadi tantangan penting dalam tata kelola keamanan nasional. Perjanjian internasional, program peningkatan kapasitas, serta berbagai forum kerja sama tidak secara otomatis menghasilkan perubahan kebijakan yang efektif di tingkat nasional (Nesadurai, 2020). Tanpa dukungan struktur kelembagaan yang solid, berbagai komitmen internasional berpotensi hanya menghasilkan dampak normatif tanpa transformasi operasional yang signifikan. Efektivitas implementasi sangat bergantung pada kualitas koordinasi antar lembaga domestik, integrasi sistem informasi, serta konsistensi perencanaan strategis jangka panjang (Singh, 2020). Fragmentasi birokrasi dapat memperlambat proses adaptasi kebijakan yang seharusnya memperkuat respons keamanan nasional. Kapasitas institusional domestik menjadi faktor penentu keberhasilan internalisasi norma internasional ke dalam praktik kebijakan nasional. Temuan ini menunjukkan bahwa kerja sama internasional perlu diimbangi dengan reformasi tata kelola keamanan yang berkelanjutan.

Di sisi lain, pola kerja sama kontra-terorisme global masih cenderung menekankan pendekatan keamanan yang bersifat reaktif, terutama melalui pertukaran intelijen, pengawasan keamanan, serta koordinasi operasi penegakan hukum. Pendekatan tersebut efektif dalam mengganggu aktivitas jaringan terorisme dalam jangka pendek, namun belum sepenuhnya mampu mengatasi faktor struktural yang berkontribusi terhadap proses radikalisisasi (Schmid, 2020). Penyebaran ideologi ekstremis sering kali berkaitan dengan dinamika sosial yang lebih kompleks, termasuk ketimpangan ekonomi, marginalisasi kelompok tertentu, serta eksposur terhadap propaganda digital (Institute for Economics & Peace, 2023). Dalam konteks ini, pengembangan strategi *Countering Violent Extremism* menjadi semakin relevan sebagai pendekatan preventif dalam kebijakan keamanan kontemporer. Program pencegahan radikalisisasi, rehabilitasi mantan pelaku terorisme, serta reintegrasi sosial menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan masyarakat terhadap pengaruh ideologi ekstremis (UNOCT, 2022). Integrasi pendekatan preventif ke dalam kerangka kerja sama internasional dapat membantu mengurangi risiko reproduksi jaringan ekstremisme baru. Pergeseran fokus kebijakan ini mencerminkan perubahan paradigma global dalam memahami akar penyebab terorisme.

Ke depan, arah pengembangan kerja sama internasional Indonesia berpotensi bergerak menuju model tata kelola keamanan yang lebih berlapis dan adaptif terhadap dinamika ancaman

global. Integrasi kerja sama bilateral strategis, penguatan mekanisme institusional regional, serta keterlibatan aktor non-negara menunjukkan berkembangnya pendekatan keamanan yang lebih inklusif (Acharya, 2018). Keterlibatan organisasi masyarakat sipil dan lembaga pendidikan memperluas cakupan strategi pencegahan yang tidak terbatas pada pendekatan koersif semata. Sinergi antara aktor negara dan non-negara memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi pengaruh ideologi ekstremisme secara berkelanjutan (Schmid, 2020). Bagi Indonesia, pendekatan berlapis ini memungkinkan optimalisasi manfaat kerja sama internasional sekaligus memperkuat legitimasi kebijakan domestik dalam konteks regional. Posisi strategis Indonesia dalam berbagai forum keamanan menunjukkan potensi kontribusi yang lebih besar dalam tata kelola kontra-terorisme kawasan Asia Tenggara. Keseimbangan antara kolaborasi internasional dan penguatan kapasitas nasional menjadi faktor kunci dalam menghadapi evolusi ancaman terorisme di masa mendatang.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa kerja sama internasional memiliki posisi strategis dalam memperkuat kebijakan kontra-terorisme Indonesia di tengah karakter ancaman yang semakin terhubung lintas negara. Keterlibatan Indonesia dalam berbagai skema kolaborasi global menunjukkan bahwa kapasitas negara dalam menghadapi terorisme tidak hanya ditentukan oleh kemampuan domestik, tetapi juga oleh efektivitas interaksi dengan aktor eksternal. Melalui kemitraan bilateral, Indonesia memperoleh akses terhadap pertukaran intelijen, peningkatan kompetensi aparat, serta referensi praktik kebijakan yang telah berkembang dalam pengalaman negara lain. Pada tingkat regional, keterlibatan aktif dalam ASEAN memberikan kontribusi terhadap terbentuknya kerangka koordinasi kebijakan yang mendukung respons kolektif terhadap ancaman keamanan kawasan. Instrumen seperti *ASEAN Convention on Counter Terrorism* memperkuat harmonisasi pendekatan hukum, memperluas ruang pertukaran informasi, serta mendorong konsistensi kebijakan antarnegara anggota. Partisipasi Indonesia dalam berbagai forum keamanan kawasan menunjukkan adanya upaya untuk menempatkan kebijakan domestik dalam konteks tata kelola keamanan regional yang lebih luas. Interaksi kebijakan di tingkat kawasan memperkuat legitimasi strategi nasional sekaligus membuka peluang kolaborasi yang lebih luas dengan mitra internasional. Konvergensi kepentingan keamanan kawasan berperan penting dalam meningkatkan stabilitas regional di tengah dinamika ancaman terorisme yang terus berkembang. Posisi Indonesia dalam berbagai mekanisme regional memperlihatkan kontribusi aktif dalam membangun koordinasi keamanan kolektif. Dengan demikian, kerja sama regional menjadi salah satu pilar penting dalam penguatan kebijakan kontra-terorisme nasional.

Kontribusi kerja sama internasional juga tercermin dalam penguatan kapasitas institusional melalui berbagai platform pelatihan, pertukaran pengetahuan, serta kerja sama teknis dengan organisasi keamanan global. Penguatan kapasitas organisasi keamanan menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas respons terhadap ancaman ekstremisme. Dengan demikian, kerja sama institusional berperan dalam memperkuat fondasi kebijakan kontra-terorisme Indonesia secara sistemik. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas kerja sama internasional masih dipengaruhi oleh berbagai kendala struktural yang berkaitan dengan koordinasi kebijakan, kesenjangan kapasitas antarnegara, serta tantangan integrasi kebijakan pada tingkat domestik. Perbedaan prioritas strategis dan pendekatan keamanan antarnegara dapat memengaruhi tingkat sinkronisasi kebijakan dalam menangani ancaman terorisme transnasional. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa pola kerja sama kontra-terorisme global masih cenderung berorientasi pada pendekatan keamanan yang bersifat reaktif, terutama melalui pertukaran intelijen serta koordinasi penegakan hukum. Pendekatan tersebut efektif dalam mengganggu aktivitas jaringan terorisme, namun belum sepenuhnya mampu menjawab faktor struktural yang mendorong proses radikalisis jangka panjang. Oleh karena itu, pengembangan kebijakan ke depan memerlukan integrasi strategi yang lebih preventif melalui pendekatan *Countering Violent Extremism* yang menekankan pencegahan, rehabilitasi, serta reintegrasi sosial. Pendekatan komprehensif ini memungkinkan kebijakan kontra-terorisme tidak hanya berorientasi

pada respons keamanan, tetapi juga pada penguatan ketahanan masyarakat terhadap pengaruh ideologi ekstremisme. Integrasi strategi preventif ke dalam kerangka kerja sama internasional dapat memperkuat efektivitas kebijakan dalam jangka panjang. Bagi Indonesia, keseimbangan antara kerja sama global dan penguatan kapasitas domestik menjadi faktor penting dalam menghadapi dinamika ancaman terorisme yang terus berkembang. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa kerja sama internasional tetap menjadi instrumen strategis, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan negara dalam mengadaptasi dan mengintegrasikan berbagai bentuk kolaborasi tersebut ke dalam kebijakan nasional yang berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, A. (2018). *Constructing Global Order: Agency and Change in World Politics*. Cambridge University Press.
- ASEAN. (2018). *ASEAN Convention on Counter Terrorism Implementation Review*. ASEAN Secretariat.
- ASEANAPOL. (2021). *ASEANAPOL Annual Report on Regional Policing Cooperation*. ASEANAPOL Secretariat.
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Chalk, P. (2016). *Countering Terrorism in Southeast Asia: The Role of Regional Cooperation*. RAND Corporation.
- Commission, E. (2021). *EU Counter-Terrorism Agenda and International Cooperation Report*. European Union.
- Cooperation, J. C. for L. E. (2023). *Training and Capacity-Building Programs Report*. JCLEC.
- Counter-Terrorism, U. N. O. of. (2022). *Countering Violent Extremism Programmes and Initiatives Report*. UNOCT.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Crime, U. N. O. on D. and. (2021). *Handbook on International Cooperation against Terrorism*. UNODC.
- Denzin, N. K. (2017). *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. Routledge.
- Forum, G. C. (2020). *Strategic Framework for Countering Violent Extremism*. GCTF.
- Gunaratna, R., & Ali, M. Bin. (2021). Terrorist Rehabilitation and Community Engagement in Southeast Asia. *Studies in Conflict & Terrorism*, 44(3), 189–205. <https://doi.org/10.1080/1057610X.2018.1494402>
- Hoffman, B. (2017). *Inside Terrorism* (2nd ed.). Columbia University Press.
- INTERPOL. (2022). *Global Counter-Terrorism Strategy and Operational Activities Report*. INTERPOL.
- Jones, S. G. (2018). *A Persistent Threat: The Evolution of Al-Qaeda and Other Salafi Jihadists*. RAND Corporation.
- Keohane, R. O. (1984). *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. Princeton University Press.
- Krasner, S. D. (2016). *International Regimes*. Cornell University Press.
- Nations, U. (2020). *United Nations Global Counter-Terrorism Strategy Review*. United Nations.
- Nesadurai, H. E. (2020). The Political Economy of Security in Southeast Asia. In R. J. Heydarian & J. G. Castaneda (Eds.), *The Routledge Handbook of Asia-Pacific Security*. Routledge.
- Nye, J. S. (2017). *Understanding International Conflicts: An Introduction to Theory and History* (10th ed.). Pearson.
- Peace, I. for E. &. (2023). *Global Terrorism Index 2023: Measuring the Impact of Terrorism*. Institute for Economics & Peace.
- Police, A. F. (2021). *Regional Counter-Terrorism Cooperation Report*. AFP.

- Ramakrishna, K. (2018). Islamist Terrorism and Militancy in Southeast Asia. In *Handbook of Terrorism in the Asia-Pacific* (pp. 55–72). Imperial College Press.
- Secretariat, A. (2020). *ASEAN Political-Security Community Blueprint 2025 Implementation Report*. ASEAN Secretariat.
- Singh, B. (2020). Counter-terrorism Cooperation in Southeast Asia. *Asian Security*, 16(2), 123–140. <https://doi.org/10.1080/14799855.2019.1614816>
- State, U. S. D. of. (2022). *Country Reports on Terrorism 2021: Indonesia*. U.S. Department of State.
- Terorisme, B. N. P. (2023). *Laporan Kinerja BNPT 2022–2023*. BNPT.
- Trade, A. G. D. of F. A. and. (2022). *Australia–Indonesia Security Cooperation Overview*. DFAT.
- Weinstein, J. M. (2017). *Inside Rebellion: The Politics of Insurgent Violence*. Cambridge University Press.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE Publications.